

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isi deklarasi pariwisata berkelanjutan di Beijing 18-21 Mei 2016 menyebutkan bahwa pariwisata adalah salah satu sektor sosial ekonomi yang tumbuh, dengan estimasi 10% dari GDP dunia 1 dari 11 pekerjaan-pekerjaan serta 7% dari perdagangan global. Ekowisata adalah instrument penting dalam pembangunan berkelanjutan karena dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menggerakkan kewirausahaan, menjaga ekosistem dan keanekaragaman, menjaga adat budaya, mempromosikan pemberdayaan dan kepemilikan masyarakat lokal. Wisata berkelanjutan perlu diintegrasikan dengan kebijakan, inisiatif, proyek dan penelitian untuk memperkuat peran wisata sebagai alat pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (UNWTO, 2016).

Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata dengan kekayaan sumberdaya lingkungan alam dan budaya yang tersebar pada 17.475 pulau kecil diharapkan dapat mengurangi permasalahan kemiskinan di kawasan pesisir. Pemanfaatan pulau-pulau kecil menjadi kawasan ekowisata baru memiliki peluang semakin besar dengan adanya UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Khusus Kepulauan Riau, dengan letaknya yang strategis berdekatan dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura) dan memiliki ribuan pulau (2408 pulau) dan 95 persen wilayahnya lautan, turut tumbuh dan berkembang ekowisatanya hingga ke pulau-pulau kecil. Karena itu untuk keberlanjutannya dibutuhkan daya dukung multidimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pemanfaatan keterbatasan sumberdaya ekowisata pulau-pulau kecil harus bisa menekan dampak negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat lokal dan degradasi lingkungan atau dengan istilah ekowisata berkelanjutan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil dan terdepan yang menjadi tujuan wisata yang belum menunjukkan kemajuan yang signifikan sebagai dampak perkembangan wisata di daerahnya (Khodijah, 2014), karena itu diperlukan penelitian yang dapat menghasilkan rumusan kebijakan pengembangan wisata berkelanjutan di

pulau-pulau kecil melalui pendekatan peran komunitas wanita . Penelitian ini sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender, meningkatkan daya saing daerah serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional.

Memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di semua tingkatan dan di semua sektor penting untuk membangun ekonomi yang kuat dan stabil.¹ Pariwisata merupakan salah satu pendorong terkuat perdagangan dunia, kemakmuran serta pengentasan kemiskinan. UNWTO menyebutkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap pekerjaan diperkirakan 6-7% dari seluruh pekerjaan di dunia.² Pariwisata juga dapat membantu perempuan miskin memutus siklus kemiskinannya melalui kerja formal dan informal, kewirausahaan, pelatihan, dan perbaikan masyarakat. Tetapi, tidak semua wanita mendapat keuntungan yang sama dari pengembangan pariwisata. Dalam beberapa kasus, keterbatasan pendidikan dan sumber daya dapat mencegah perempuan termiskin dari pemanfaatan pengembangan pariwisata (UNWTO, 2010).

UNWTO-UNWomen (2010) menyebutkan dua alasan penting mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pariwisata; 1) pemerintah dan organisasi internasional berkomitmen untuk kesetaraan gender. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah komponen yang fundamental dalam keadilan masyarakat dan pariwisata dapat memberikan jalan untuk pemberdayaan, 2) status perempuan bekerja dan mendapatkan upah dari pariwisata lebih rendah. Sehingga partisipasi penuh perempuan dalam pariwisata sangat penting untuk membangun ekonomi yang kuat.

Letak yang sangat strategis propinsi Kepulauan Riau pada jalur perkapalan internasional yang sangat sibuk dan menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik serta berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN dan beberapa provinsi sangat mendukung upaya pengembangan wisata bahari di wilayah ini.

¹ UNIFEM and the UN Global Compact (2010), Women's Empowerment Principles: Equality Means Business, UN, New York, available: http://www.unifem.org/attachments/products/WomensEmpowermentPrinciples_en.pdf.

² UNWTO (2010), UNWTO Tourism Highlights, 2010 Edition, UNWTO, Madrid.

1.2 Permasalahan

Secara makro ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu diatas 6%, bahkan dengan prestasi ekonomi tersebut Indonesia menjadi anggota G-20. Cadangan devisanya mencapai US\$ 120 miliar dan tahun 2012 PDB Indonesia menempati peringkat ke-16 di dunia sebesar US\$ 1 triliun. Namun secara mikro, kondisi sosial ekonomi tergolong buruk. Angka pengangguran terbuka mencapai 7,17 juta orang, jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang, bahkan bila berpedoman terhadap standar yang ditetapkan Bank Dunia (US\$ 2/orang/hari), maka jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin mencapai 117 juta orang atau hampir 50% penduduk Indonesia (BPS, 2013; World Bank, 2012). Selain itu, kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi masalah besar di Indonesia seperti belum meratanya pembangunan hingga ke desa pesisir pulau-pulau kecil..

Berdasarkan potensi geoekonomi dan sumber daya alam (terbaharui dan tak terbaharui), Kepri berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Posisinya sangat strategis dan tepat berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia/ALKI I dan jalur perdagangan internasional. Berdasarkan potensi tersebut tidak seharusnya Kepri memiliki daerah tertinggal serta penduduk miskin hingga $\pm 7,1$ %. Karena itu dibutuhkan konsep pengembangan kawasan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan nilai ekonomi sumberdaya yang dimiliki serta nilai tambah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya tingginya perhatian pemerintah terhadap sektor kemaritiman merupakan peluang untuk mengembangkan ekowisata berkelanjutan. Keterlibatan seluruh komunitas masyarakat dalam aktifitas ekowisata merupakan faktor penting untuk merubah struktur sosial ekonomi masyarakat (Snyman, 2016), terutama terhadap komunitas wanita yang selama ini sering terabaikan. Menurut Padahal jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa pesisir dan pulau-pulau kecil sangat berimbang atau 50%. Tingginya jumlah penduduk perempuan ini perlu mendapat perhatian khusus dengan mengetahui perannya dalam pengembangan wisata bahari di desa pesisir (khodijah, 2014; 2015). Penelitian ini dimulai dari mengetahui status sosial ekonomi komunitas wanita dan rumah tangganya,

menganalisis potensi sosio-ekologi ekowisata bahari di pulau-pulau kecil, menganalisis relasi aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata di Desa serta menganalisis peran kelembagaan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi wanita nelayan di desa. Dapat disimpulkan temuan utama penelitian ini memperoleh rekomendasi penguatan kelembagaan lokal untuk meningkatkan aktifitas ekonomi wanita nelayan di desa. Sehingga pertanyaan penelitiannya dapat dirumuskan menjadi “Bagaimana pemanfaatan wisata bahari desa mendukung aktifitas ekonomi wanita nelayan? . Sedangkan target luaran utama penelitian ini adalah publikasi ke jurnal internasional terindeks yaitu *journal of ecotourism*

1.3 Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mendapatkan data dan informasi tentang karakteristik sosial dan ekonomi komunitas wanita Desa Benan Kabupaten Lingga
- b) Menganalisis relasi aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata di Desa Benan Kabupaten Lingga
- c) Menganalisis peran kelembagaan wisata di Desa dalam meningkatkan aktifitas ekonomi wanita nelayan

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terwujudnya pembangunan wisata sadar gender melalui penguatan kelembagaan kelompok wisata desa sehingga mampu meningkatkan kondisi social ekonomi rumah tangga nelayan.

1.4 Urgensi Penelitian

Kemiskinan dan kesetaraan gender masih menjadi isu utama pembangunan terutama di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar. Tingkat kemiskinan yang paling lambat pergeserannya terdapat pada desa-desa pesisir /pulau-pulau kecil. Hal ini disebabkan sulitnya akses transportasi menuju ke wilayah tersebut serta letaknya yang cukup jauh dari pusat kota, tetapi kawasan ini memiliki potensi wisata bahari sangat menarik. Pembangunan kelautan perikanan melalui pengembangan wilayah konservasi hingga ke wilayah pulau-pulau kecil menjadi peluang pengembangan ekowisata bahari (Khodijah, 2013). Pentingnya pengembangan wisata sudah didekarasikan dalam

UNWTO (2016) bahwa wisata sebagai alat pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Persoalannya ketika para nelayan yang sudah turun temurun menekuni pekerjaannya melaut sebagai nelayan maka pengembangan bisnis pariwisata bukan sesuatu yang menggiurkan mereka. Karena itu peran komunitas wanita diharapkan mampu menopang keberlanjutan penghidupan rumah tangga nelayan yang masih bergantung pada musim, seperti rekomendasi hasil penelitian disertasi penulis (Khodijah, 2014), selain itu komunitas wanita memiliki tingkat sadar wisata yang tinggi (Khodijah, 2015). Tetapi karena tidak didukung dengan pendidikan keterampilan yang dimiliki memadai maka turut mempengaruhi tingkat adopsi masyarakat terhadap pengembangan ekowisata di wilayahnya (Asmira, 2015). Upaya meningkatkan peran dan keterlibatan kaum perempuan menjadi sangat penting untuk memperkuat pembangunan kawasan pesisir pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Hal ini didukung dari jumlah waktu luang yang relatif masih tinggi bagi komunitas wanita yang dapat dimanfaatkan untuk aktifitas produktif (Khodijah, 2010). Sehingga dapat diduga bahwa komunitas wanita dapat berperan dalam mewujudkan pengembangan ekowisata berkelanjutan di pulau-pulau kecil dan terluar. Sehingga keberadaan komunitas wanita di wilayah tersebut meskipun tidak turut melaut tetapi keberadaannya dapat memperkuat negara kesatuan NKRI di wilayah perbatasan. Dukungan dari semua pihak tentunya merupakan faktor penting untuk mendukung komunitas wanita berkontribusi dalam aktifitas ekowisata di desanya.

1.5. Rencana Target Capaian

Tabel 1. Rencana Target Capaian

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS
1	Publikasi Ilmiah	Internasional			Draft
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional			Tidak ada
		Nasional			Tidak ada
3	Hak kekayaan intelektual				Tidak ada
4	Rekayasa sosial ekonomi				Tidak ada
5	Buku ajar				Tidak ada